



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 April 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YULI FAJAR SUSETYO
2. Jabatan : KETUA PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI MAGISTER PSIKOLOGI PROFESI (PAW)
3. NHK : 740867

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.066.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 431 m²/145 m² di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 985.000.000
2. Tanah Seluas 276 m² di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 385.000.000
3. Tanah Seluas 135 m² di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 436.000.000
4. Tanah Seluas 147 m² di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 346.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU TERIOS/MOBIL PENUMPANG Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 97.000.000
2. MOBIL, FORD FIESTA MOBIL SEDAN Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 72.000.000
3. MOTOR, BEAT SPM SOLO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
4. MOTOR, PIAGGIO SCOOTER Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
5. MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
6. MOTOR, HONDA BEET Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.



13.000.000

7. MOBIL, TOYOTA HARRIER 24G JEEP Tahun 2004, HASIL
SENDIRI Rp. 120.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	16.200.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	45.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.473.200.000
III. HUTANG	Rp.	20.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.453.200.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.